

Persepsi Stakeholder Mengenai Kesiapan Sarana Prasarana Kecamatan Kotabumi Menjadi Kawasan Perkotaan

Adelia Azis¹, Rahayu Sulistiyorini², Fembriarti Erry Prasmatiwi³

¹⁻³Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Lampung, Indonesia

adeliaazs28@gmail.com¹, sulistiyorinijsmd@yahoo.co.uk²,

fembriarti.erry@fp.unila.ac.id³

ABSTRACT.

Kotabumi Sub-district serves as the administrative center and main activity hub of North Lampung Regency and has functionally exhibited characteristics of an urban area. However, this development needs to be supported by adequate readiness of facilities and infrastructure to ensure that the transformation toward an urban area can proceed optimally and sustainably. Differences in perceptions between the community and the government regarding the condition of facilities and infrastructure are important to examine as a basis for formulating appropriate development strategies. This study aims to analyze stakeholder perceptions regarding the readiness of facilities and infrastructure in Kotabumi Sub-district to become an urban area, to identify gaps between existing conditions and ideal conditions based on the requirements of the Indonesian National Standard (SNI) for Urban Residential Environment Planning and the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of North Lampung Regency, and to formulate suitable area development strategies. The research employed a mixed-methods approach combining quantitative and qualitative methods. Quantitative data were obtained through Likert-scale questionnaires capturing community and government perceptions and were analyzed using descriptive analysis and gap analysis. Stakeholder interviews were conducted to strengthen the formulated strategies. In addition, a precedent study of district-level urban areas was used as a reference in developing the strategies. The results indicate that the readiness of facilities and infrastructure in Kotabumi Sub-district falls within the category of ready toward optimal. Government, education, health, and trade and service facilities are considered to function relatively well; however, gaps remain in terms of service quality and equitable distribution. Meanwhile, cultural and recreational facilities, green open spaces, and environmental infrastructure such as sanitation, solid waste management, and drainage show relatively lower levels of readiness and are therefore prioritized for development. The study concludes that Kotabumi Sub-district has the potential and basic readiness to be developed as an urban area; however, improvements in the quality, equity, and integration of facilities and infrastructure are required through integrated planning, synergy among stakeholders, and spatial use control to meet urban area standards optimally and sustainably.

Keywords: Urban Area, Facilities and Infrastructure, Stakeholder Perceptions, Gap Analysis.

ABSTRAK.

Kecamatan Kotabumi merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas utama Kabupaten Lampung Utara yang secara fungsional telah menunjukkan karakteristik kawasan perkotaan.

Namun, perkembangan tersebut perlu didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana yang memadai agar transformasi menuju kawasan perkotaan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah terkait kondisi sarana dan prasarana menjadi penting untuk dikaji sebagai dasar perumusan strategi pengembangan kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi stakeholder mengenai kesiapan sarana dan prasarana Kecamatan Kotabumi untuk menjadi kawasan perkotaan, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal berdasarkan kebutuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tata Cara Perencanaan Perumahan Lingkungan Perkotaan serta RPJMD Kabupaten Lampung Utara, serta merumuskan strategi pengembangan kawasan yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*). Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner likert persepsi masyarakat dan pemerintah yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan *gap analysis*. Hasil wawancara stakeholder untuk memperkuat strategi yang telah disusun. Selain itu, digunakan studi preseden kawasan perkotaan tingkat kabupaten sebagai bahan acuan dalam perumusan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana Kecamatan Kotabumi berada pada kategori siap menuju optimal. Sarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta perdagangan dan jasa dinilai telah berfungsi cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan pada aspek kualitas dan pemerataan layanan. Sementara itu, sarana kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka hijau, serta prasarana lingkungan seperti sanitasi, persampahan, dan drainase menunjukkan tingkat kesiapan yang relatif lebih rendah sehingga dijadikan prioritas dalam pengembangannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Kecamatan Kotabumi memiliki potensi dan kesiapan dasar untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, namun memerlukan peningkatan kualitas, pemerataan, dan integrasi sarana dan prasarana melalui perencanaan yang terpadu, sinergi antar pemangku kepentingan, serta pengendalian pemanfaatan ruang agar mampu memenuhi standar kawasan perkotaan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kawasan Perkotaan, Sarana dan Prasarana, Persepsi Stakeholder, *Gap Analysis*.

PENDAHULUAN

Kawasan perkotaan sebagai gejala urbanisasi membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia beserta fasilitas penunjangnya. Kebutuhan dasar tersebut terus meningkat secara alamiah seiring kompleksitasnya kebutuhan hidup bermasyarakat, seperti kebutuhan untuk aktivitas sosial, aktivitas ekonomi dan aktivitas lainnya. Fenomena tersebut menuntut penyediaan wadah aktifitas berupa sarana dan prasarana permukiman di daerah perkotaan untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakatnya (Tahir & Nahdatunnisa, 2020). Prasarana dan sarana perkotaan semestinya mempertimbangkan potensi sumberdaya alam dan potensi sumberdaya manusia. Hal ini dimaksudkan untuk tetap mempertahankan apa yang telah dikembangkan dan bagaimana upaya mengikutsertakan masyarakat dalam wujud implementasi pembangunan (Indrajaya, 2020).

Persepsi Masyarakat Perkotaan Terhadap Pentingnya terhadap kawasan perkotaan sebagai aktor yang sangat berperan dalam kegiatan kawasan perkotaan, dan Persepsi dapat mempengaruhi orang dalam menentukan sikap dan tindakannya sehingga orang akan ikut berperan aktif dan berpartisipasi didalamnya (Januarisa, Hardiansyah, & Fahrizal, 2015). Pentingnya persepsi stakeholder ini sebagai tolak ukur atas kenyamanan masyarakat akan kawasan perkotaan yang memberikan pelayanan yang baik didalam kegiatan perkotaannya, tidak terlepas dikarenakan masyarakat yang menjadi faktor utama keterlibatan kegiatan dikawasan perkotaan.

Berdasarkan penelitian (Budiharjo, 1993) menyatakan bahwa yang sering terabaikan padahal sangat penting artinya bagi kelayakan hidup manusia penghuni lingkungan perumahan adalah sarana dan prasarana, lalu menurut (Kustiwan) Pada dasarnya untuk melihat apakah konsentrasi itu sebagai kota atau tidak, adalah dari seberapa banyak jenis fasilitas perkotaan yang tersedia dan seberapa jauh kota itu menjalankan fungsi perkotaan, lalu berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan terdiri dari Sarana pemerintahan dan pelayanan umum, Sarana pendidikan dan pembelajaran, Sarana Kesehatan, Sarana Peribadatan, Sarana Perdagangan dan niaga, Sarana Kebudayaan dan rekreasi, Sarana ruang terbuka lalu untuk prasarana yaitu Jaringan jalan, Jaringan drainase, Jaringan air bersih, Jaringan air limbah, Jaringan persampahan, Jaringan listrik, Jaringan telepon, Jaringan transportasi lokal.

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung dan ibu kota Kabupaten Lampung Utara yaitu Kecamatan Kotabumi. Kecamatan Kotabumi merupakan jalur transportasi yang sering dilewati kendaraan menuju Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, dan wilayah Sumatera Selatan, serta menjadi alternatif akses menuju Kabupaten Tulang Bawang Barat. Akses ke Kecamatan Kotabumi melalui jalan tol dapat dilakukan melalui ruas Tol Terbanggi Besar yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, karena Kabupaten Lampung Utara tidak memiliki pintu tol sendiri. Akibatnya, keberadaan tol saat ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Lampung Utara jarang dilewati transportasi yang dapat menempuh perjalanan melalui jalan tol.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung perkembangan Kawasan Perkotaan di Kecamatan Kotabumi yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034, terdapat arahan dimana berupa pembangunan Perkotaan Kotabumi di Kecamatan Kotabumi. Maka dari itu untuk mewujudkan kawasan perkotaan Kotabumi, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung aktivitas masyarakat di dalamnya. Selain itu, diperlukan persepsi para stakeholder untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang ada di

Kecamatan Kotabumi agar dapat menilai kesiapan lokasi studi dalam pengembangan kawasan perkotaan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi, berdasarkan persepsi stakeholder, apakah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kotabumi telah mendukung pengembangan kawasan perkotaan, yang nantinya penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi stakeholder untuk mengetahui sarana prasarana apa saja yang perlu ditinjau kembali untuk menjadikan Kecamatan Kotabumi menjadi Kawasan Perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey dimana dalam penelitian survei, peneliti menyeleksi suatu sampel dari responden menggunakan kuesioner atau melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi terhadap variabel yang menjadi perhatian peneliti. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk menjawab dari tujuan yang ada pada penelitian.

Penelitian ini juga tergolong penelitian deskriptif berdasarkan tujuan atau sifat masalah, dan fokusnya pada pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan yang objektif tentang suatu konsep atau gejala dari objek yang diteliti, dengan tujuan utama mengungkap fakta dan memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan objek yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix method, yang merupakan penelitian yang mengintegrasikan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau proyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu penduduk yang tinggal di Kecamatan Kotabumi. peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel individu sebagai responden kuesioner karena keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Dalam penelitian ini pengambilan sampel akan dilakukan melalui pengisian kuesioner daring oleh responden ditahap pengumpulan data, dimana responden harus memenuhi kriteria yang telah yang sesuai pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis strategi untuk mendukung kesiapan sarana prasarana kecamatan kotabumi untuk menjadi Kawasan Perkotaan Kotabumi

Analisis strategi pada subbab ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan dan langkah-langkah prioritas yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana di Kecamatan Kotabumi menuju pembentukan kawasan perkotaan. Setelah dilakukan analisis terhadap persepsi stakeholder dan identifikasi kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi eksisting dengan standar perkotaan, dokumen

kebijakan serta persepsi stakeholder diperlukan pendekatan strategis yang mampu menjembatani perbedaan tersebut melalui intervensi yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Strategi yang disusun berlandaskan pada hasil analisis sebelumnya yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan, dengan mempertimbangkan peran masyarakat dan pemerintah sebagai aktor utama dalam proses pembangunan wilayah. Melalui perumusan strategi ini, diharapkan dapat diidentifikasi prioritas pembangunan yang paling mendesak dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana, sehingga Kecamatan Kotabumi memiliki kesiapan yang optimal dalam bertransformasi menjadi kawasan perkotaan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum kesiapan sarana dan prasarana Kecamatan Kotabumi telah berada pada kategori baik berdasarkan persepsi masyarakat dan pemerintah maka dalam hal ini berdasarkan persepsi dinilai dari kondisi, kualitas, dan jangkauan masyarakat merasa sudah terlayani dengan baik, namun masih terdapat kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal sehingga seluruhnya masih belum optimal. Oleh karena itu sangat dibutuhkan perhatian penuh untuk sarana prasarana di Kecamatan Kotabumi untuk menjadi kawasan perkotaan, strategi pengembangan diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu (1) peningkatan kapasitas fisik infrastruktur, (2) penguatan tata kelola dan manajemen layanan publik, serta (3) partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana secara berkelanjutan, dalam hal ini strategi yang bisa diambil berdasarkan analisis-analisis sebelumnya yaitu:

1. Bidang Sarana

Strategi pengembangan diarahkan pada peningkatan kualitas fasilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

- a. Sarana pemerintahan perlu diperkuat melalui modernisasi kantor dan digitalisasi layanan publik berbasis SPBE.
- b. Sarana pendidikan dan kesehatan difokuskan pada pemerataan akses serta peningkatan mutu pelayanan.
- c. Sarana perdagangan dan jasa perlu dikembangkan melalui revitalisasi pasar dan dukungan UMKM digital.
- d. Sarana kebudayaan, rekreasi, dan ruang terbuka diarahkan pada penyediaan ruang publik yang inklusif dan hijau untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Bidang Prasarana

- a. Strategi pengembangan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar yang memadai dan berkelanjutan.

- b. Prasarana jaringan jalan dan transportasi ditingkatkan melalui perbaikan kualitas dan integrasi antarwilayah.
- c. Drainase, air bersih, air limbah, dan persampahan ditingkatkan melalui pendekatan *eco-engineering* dan sistem terpadu.
- d. Listrik dan telekomunikasi diperkuat untuk mendukung transformasi digital dan kesiapan menuju *smart city*.
- e. Ruang terbuka hijau (RTH) dikembangkan dengan pendekatan *community-based green management*, mengoptimalkan lahan publik dan partisipasi masyarakat.

Strategi Prioritas Pengembangan

Berdasarkan hasil *gap analysis*, tingkat urgensi pembangunan, dan keterkaitannya dengan fungsi kawasan perkotaan, terdapat lima strategi prioritas utama yang perlu diimplementasikan untuk mempercepat kesiapan Kecamatan Kotabumi menjadi kawasan perkotaan.

- a. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lingkungan Kota
Gap terbesar ditemukan pada luasan RTH yang baru mencapai sekitar 0,38% dari standar ideal 30%. Oleh karena itu, strategi prioritas diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi taman kota, jalur hijau, serta taman lingkungan dengan pendekatan *community-based green management* yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan ruang hijau. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan, memperbaiki sirkulasi udara, memperkuat daya dukung ekologis kota, serta menciptakan ruang publik yang inklusif dan nyaman bagi masyarakat.
- b. Penguatan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Perkotaan
Cakupan layanan air bersih dan sistem pengelolaan air limbah di Kecamatan Kotabumi masih belum merata. Strategi prioritas diarahkan pada peningkatan kapasitas distribusi air bersih melalui optimalisasi SPAM, pembangunan sumber air baru, serta penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. Upaya ini ditujukan untuk memastikan ketersediaan air bersih yang layak, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat.
- c. Modernisasi Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Dalam mendukung karakteristik kota yang efisien dan adaptif, strategi prioritas difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan publik melalui penerapan *Smart Governance* dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan memperkuat integrasi data pelayanan lintas sektor. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan tata

kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.

d. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Transportasi

Meskipun jaringan jalan dan konektivitas antarwilayah di Kecamatan Kotabumi tergolong baik, kualitas infrastruktur dan fasilitas transportasi publik masih perlu ditingkatkan. Strategi ini meliputi perbaikan kondisi jalan, penataan rute transportasi umum, dan pengembangan fasilitas transportasi ramah lingkungan seperti jalur sepeda dan angkutan hijau. Tujuannya adalah memperkuat konektivitas antar pusat kegiatan, mendorong mobilitas masyarakat yang efisien, serta mendukung aktivitas ekonomi perkotaan yang berkelanjutan.

e. Peningkatan Akses Telekomunikasi dan Digitalisasi Infrastruktur

Kesenjangan akses jaringan telekomunikasi yang masih mencapai sekitar 39% perlu menjadi perhatian utama. Strategi prioritas diarahkan pada perluasan infrastruktur digital melalui pembangunan menara BTS baru, peningkatan kapasitas jaringan fiber optic, serta penyediaan *free hotspot* di ruang publik. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas digital, mendukung sistem informasi perkotaan, serta mempercepat transformasi menuju *smart city* yang inovatif dan berdaya saing.

Strategi dan Tanggapan Pemerintah

Strategi dan tanggapan pemerintah pada subbab ini didasarkan pada hasil wawancara dengan perangkat daerah terkait yang berperan dalam perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di Kecamatan Kotabumi. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan pemerintah mengenai kondisi eksisting, tantangan yang dihadapi, serta langkah strategis yang telah dan akan dilakukan dalam mendukung kesiapan Kecamatan Kotabumi menuju kawasan perkotaan. Hasil wawancara ini menjadi pelengkap, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan respons pemerintah terhadap temuan analisis persepsi stakeholder serta kesenjangan yang teridentifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan akademisi, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kotabumi secara umum telah memiliki kesiapan yang cukup untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Kesiapan tersebut ditunjukkan oleh relatif lengkapnya sarana dan prasarana utama, serta peran Kecamatan Kotabumi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan penggerak ekonomi Kabupaten Lampung Utara. Meskipun demikian, seluruh stakeholder sepakat bahwa kesiapan tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan sarana dan prasarana. Beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi meliputi penurunan kualitas layanan kesehatan, keterbatasan pengelolaan persampahan (TPA masih sistem *open*

dumping), kondisi jaringan jalan lingkungan yang belum merata, serta keterbatasan prasarana lingkungan seperti drainase, air bersih, dan ruang terbuka publik.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah telah mengakomodasi pengembangan Kecamatan Kotabumi sebagai kawasan perkotaan dalam berbagai dokumen perencanaan, seperti RPJMD, RTRW, serta proses penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kotabumi. Namun, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada keterpaduan lintas sektor, kesinambungan perencanaan, dan dukungan aktif masyarakat. Dengan demikian, hasil wawancara menegaskan bahwa pengembangan Kecamatan Kotabumi sebagai kawasan perkotaan tidak hanya membutuhkan pemenuhan sarana dan prasarana fisik, tetapi juga penguatan tata kelola pemerintahan, perencanaan spasial yang detail, serta kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Berdasarkan sintesis hasil wawancara seluruh stakeholder, strategi pengembangan Kecamatan Kotabumi sebagai kawasan perkotaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penguatan Kebijakan dan Perencanaan Tata Ruang
Mempercepat penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kotabumi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, penentuan pusat-pusat pertumbuhan, serta arah pengembangan sarana dan prasarana perkotaan secara terintegrasi.
- b. Peningkatan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur Jalan dan Transportasi
Menjadikan jaringan jalan dan transportasi sebagai prioritas utama, baik jalan lingkungan maupun jalan penghubung antar kawasan, serta menghidupkan kembali dan menambah trayek transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, mengingat posisi Kotabumi sebagai simpul pergerakan regional.
- c. Peningkatan Prasarana Dasar Perkotaan
Memperbaiki dan meningkatkan layanan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan, termasuk revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan perkotaan.
- d. Peningkatan Sarana Pelayanan Publik Strategis
Menguatkan sarana kesehatan, khususnya rumah sakit, agar mampu melayani skala kabupaten dan wilayah sekitar, sejalan dengan fungsi Kotabumi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- e. Pengembangan Kawasan Permukiman yang Terpadu dan Layak Huni
Mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan penyediaan prasarana pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, dan air bersih, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman.
- f. Penyediaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik

Menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang publik yang memadai sebagai bagian dari sarana sosial perkotaan untuk mendukung kualitas lingkungan, aktivitas sosial, dan keberlanjutan kawasan.

g. Penguatan Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat agar pembangunan kawasan perkotaan berjalan selaras dan berkelanjutan.

Preseden Pengembangan Kawasan Perkotaan: Studi Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah kabupaten di Indonesia yang memiliki karakteristik perdesaan dominan dengan pusat-pusat pelayanan yang berkembang menuju fungsi perkotaan, sehingga relevan untuk dijadikan preseden dalam pengembangan Kecamatan Kotabumi. Secara administratif, Sukoharjo berperan sebagai wilayah penyangga aktivitas ekonomi dan pelayanan regional, namun tetap menghadapi tantangan keterbatasan sarana dan prasarana perkotaan yang merata di seluruh wilayahnya.

Berdasarkan penelitian (Cahyadani & Djunaedi, 2022), Kabupaten Sukoharjo mengadopsi konsep smart city secara adaptif dengan menyesuaikan kondisi lokal wilayah kabupaten yang tidak sepenuhnya bersifat urban. Penerapan konsep tersebut tidak hanya difokuskan pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten tidak harus meniru pola kota besar, melainkan perlu disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, karakter masyarakat, serta tingkat kesiapan infrastruktur yang ada. Dalam konteks sarana dan prasarana, Sukoharjo menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur fisik dapat diimbangi dengan perencanaan strategis yang terarah, khususnya melalui integrasi dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan masterplan pengembangan wilayah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa strategi pembangunan di Sukoharjo menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan dasar, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lingkungan, sebagai fondasi utama dalam proses transformasi menuju kawasan yang lebih urban.

Relevansi pengalaman Kabupaten Sukoharjo dengan Kecamatan Kotabumi terletak pada kesamaan kondisi transisi wilayah, di mana Kotabumi juga berfungsi sebagai pusat administrasi dan pelayanan Kabupaten Lampung Utara, namun masih memiliki karakteristik non-metropolitan. Strategi adaptif yang diterapkan di Sukoharjo memberikan pembelajaran penting bahwa kesiapan sarana dan prasarana perkotaan dapat dicapai secara bertahap melalui prioritas pembangunan, penguatan kelembagaan, serta pelibatan masyarakat sebagai bagian dari proses pengelolaan wilayah. Dengan

demikian, Kabupaten Sukoharjo dapat dijadikan acuan strategis bagi Kecamatan Kotabumi dalam merumuskan arah pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang realistis, kontekstual, dan berkelanjutan, tanpa harus bergantung pada model pembangunan kota besar yang kurang sesuai dengan kapasitas wilayah kabupaten.

Strategi Untuk Mendukung Kesiapan Sarana Prasarana Kecamatan Kotabumi Untuk Menjadi Kawasan Perkotaan Kotabumi

Berdasarkan hasil analisis persepsi masyarakat dan pemerintah, gap analysis terhadap kondisi ideal (SNI dan RPJMD), serta pendalaman melalui wawancara stakeholder, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kotabumi telah berada pada tahap siap berkembang menuju kawasan perkotaan, namun masih menghadapi kesenjangan signifikan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal pada hampir seluruh komponen sarana dan prasarana. Oleh karena itu, strategi pengembangan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan fisik infrastruktur, tetapi juga pada penguatan tata kelola, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat.

Secara konseptual, strategi pengembangan Kecamatan Kotabumi disusun dengan mengadopsi pendekatan pengembangan perkotaan bertahap dan adaptif, sebagaimana diterapkan pada preseden Kabupaten Sukoharjo, yang menekankan keselarasan antara kapasitas wilayah kabupaten, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan daerah (Cahyadani & Djunaedi, 2022).

a. Strategi Penguatan Sarana Perkotaan sebagai Pondasi Aktivitas Sosial dan Ekonomi

Strategi pengembangan sarana diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan fungsi sosial-ekonomi kawasan, mengingat hasil persepsi menunjukkan bahwa sarana telah tersedia namun belum optimal secara kualitas dan jangkauan.

- 1) Sarana pemerintahan dikembangkan melalui modernisasi fasilitas dan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pelayanan publik, sejalan dengan praktik *smart governance* adaptif seperti di Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Sarana pendidikan dan kesehatan diprioritaskan pada pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan, khususnya penambahan jenjang pendidikan menengah serta peningkatan kapasitas dan kelas layanan rumah sakit agar mampu menjalankan fungsi Kotabumi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- 3) Sarana perdagangan dan jasa diarahkan pada revitalisasi pasar tradisional, penataan zonasi perdagangan, serta penguatan UMKM berbasis digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
- 4) Sarana kebudayaan, rekreasi, dan ruang terbuka dikembangkan sebagai penyeimbang fungsi ekonomi, melalui penyediaan ruang publik yang inklusif

guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan memperkuat identitas lokal.

b. **Strategi Penguatan Prasarana Dasar Perkotaan secara Terpadu dan Berkelanjutan**

Hasil gap analysis menunjukkan bahwa prasarana dasar merupakan komponen dengan tingkat kesenjangan paling besar. Oleh karena itu, strategi diarahkan pada pemenuhan standar minimum perkotaan secara bertahap namun konsisten.

Jaringan jalan dan transportasi diprioritaskan sebagai prasarana penggerak utama kawasan, melalui peningkatan kemantapan jalan, penataan trayek transportasi umum, dan penguatan konektivitas antar pusat kegiatan.

- 1) Prasarana air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan dikembangkan melalui sistem terpadu berbasis kawasan, termasuk optimalisasi SPAM, pembangunan IPAL komunal, normalisasi drainase, serta perbaikan sistem pengelolaan TPA dari *open dumping* menuju sistem yang lebih berkelanjutan.
- 2) Jaringan listrik dan telekomunikasi diperkuat tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga kualitas dan keandalan layanan, sebagai prasyarat transformasi menuju kawasan perkotaan yang adaptif dan berbasis digital.

c. **Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Lingkungan Perkotaan**

Kesenjangan terbesar ditemukan pada penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga strategi diarahkan pada percepatan pemenuhan fungsi ekologis kota. Pengembangan RTH dilakukan melalui optimalisasi lahan publik, sempadan sungai, dan jalur hijau jalan, dengan menerapkan pendekatan *community-based green management*, yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan ruang hijau. Pendekatan ini sejalan dengan praktik di Kabupaten Sukoharjo yang menekankan keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

d. **Strategi Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Perkotaan**

Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil wawancara dan preseden Sukoharjo, keberhasilan pengembangan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten sangat ditentukan oleh tata kelola. Strategi ini meliputi:

- 1) Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kotabumi,
- 2) Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah,
- 3) Perta peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana perkotaan.

e. **Strategi Pelibatan Masyarakat dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan**

Pengembangan Kecamatan Kotabumi sebagai kawasan perkotaan diarahkan pada pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Partisipasi masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra dalam perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan sarana prasarana. Pendekatan ini memperkuat legitimasi pembangunan dan meningkatkan keberlanjutan hasil pembangunan.

f. **Sintesis Strategi dengan Preseden Kabupaten Sukoharjo**

Mengacu pada preseden Kabupaten Sukoharjo, strategi pengembangan Kecamatan Kotabumi tidak diarahkan untuk meniru model kota besar, melainkan menerapkan model pengembangan perkotaan kontekstual, yang:

- 1) bertahap sesuai kapasitas wilayah,
- 2) terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RTRW, RDTR),
- 3) menempatkan pelayanan dasar dan tata kelola sebagai prioritas awal, dan
- 4) mengedepankan partisipasi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, strategi yang dirumuskan dalam penelitian ini secara jelas merumuskan arah pengembangan sarana dan prasarana Kecamatan Kotabumi yang realistis, terukur, dan berkelanjutan untuk mendukung transformasinya menjadi kawasan perkotaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi stakeholder terhadap kesiapan sarana dan prasarana Kecamatan Kotabumi untuk menjadi kawasan perkotaan, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kotabumi secara umum telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup dan berada pada kategori *siap berkembang menuju kawasan perkotaan*. Hal ini ditunjukkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang relatif lengkap serta peran strategis Kecamatan Kotabumi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan hasil analisis persepsi masyarakat dan pemerintah, evaluasi kondisi eksisting terhadap kondisi ideal berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tata Cara Perencanaan Perumahan Lingkungan Perkotaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara, serta pendalaman melalui wawancara stakeholder, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kotabumi secara umum telah memiliki kesiapan awal untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Kesiapan tersebut tercermin dari ketersediaan sarana dan prasarana utama serta peran Kecamatan Kotabumi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi Kabupaten Lampung Utara.

Namun demikian, Analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tata Cara Perencanaan Perumahan Lingkungan Perkotaan dan dokumen RPJMD Kabupaten

Lampung Utara menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, baik dari aspek sarana maupun prasarana. Beberapa komponen sarana seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan telah dinilai cukup siap oleh masyarakat dan pemerintah, sedangkan sarana kebudayaan, rekreasi, serta ruang terbuka hijau masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Dari sisi prasarana, kesenjangan paling menonjol terdapat pada prasarana lingkungan, seperti air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, serta kualitas dan pemerataan jaringan jalan lingkungan.

Persepsi masyarakat dan pemerintah secara umum menunjukkan arah penilaian yang sejalan, yaitu menilai Kecamatan Kotabumi berada pada kategori *siap menuju optimal*. Masyarakat menekankan pada aspek kualitas pelayanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana, sementara pemerintah menyoroti aspek perencanaan, kebijakan, serta keterbatasan sumber daya dan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan. Perbedaan sudut pandang tersebut memperkuat pentingnya integrasi antara kebutuhan pengguna dan kapasitas penyedia layanan dalam perumusan strategi pengembangan kawasan.

Hasil wawancara dengan stakeholder menguatkan temuan kuantitatif penelitian, bahwa pengembangan Kecamatan Kotabumi sebagai kawasan perkotaan memerlukan pendekatan yang terencana, terpadu, dan bertahap. Keberhasilan pengembangan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan infrastruktur fisik, tetapi juga oleh penguatan tata kelola pemerintahan, kejelasan pengendalian pemanfaatan ruang, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Preseden Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa wilayah kabupaten dengan karakteristik non-metropolitan dapat mengembangkan kawasan perkotaan secara adaptif melalui perencanaan yang realistis, prioritas pembangunan yang jelas, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kotabumi memiliki potensi dan kesiapan yang memadai untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, namun masih memerlukan upaya peningkatan kualitas, pemerataan, dan integrasi sarana dan prasarana agar mampu memenuhi standar kawasan perkotaan secara optimal dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah disarankan untuk memprioritaskan peningkatan prasarana dasar perkotaan, khususnya air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, dan ruang terbuka hijau, agar kesenjangan antara kondisi eksisting dan standar ideal dapat dikurangi. Selain itu, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kotabumi perlu dilakukan sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

2. Bagi perangkat daerah terkait diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. Setiap perangkat daerah diharapkan tidak bekerja secara sektoral, melainkan mengintegrasikan program dan kegiatan sesuai dengan arah pengembangan kawasan perkotaan Kotabumi.
3. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan, tidak hanya sebagai pengguna fasilitas, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pengawasan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberlanjutan pembangunan kawasan perkotaan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kesiapan Kecamatan Kotabumi dari aspek yang lebih luas, seperti kapasitas fiskal daerah, dampak sosial ekonomi pengembangan kawasan perkotaan, serta analisis spasial yang lebih mendalam. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif yang lebih detail dan perbandingan dengan lebih banyak preseden daerah lain dapat memperkaya hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kotabumi dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Lampung Utara.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E., & Yulianda, F. (2017). Pengembangan wilayah pesisir Pantai Utara Jawa Tengah berdasarkan infrastruktur daerah: Studi kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 145–157.
- Hutabarat, N. P. (2020). Identifikasi ketersediaan infrastruktur Kecamatan Tanjung sebagai pusat aktivitas Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *Matra*, 105–115.
- Indrajaya. (2020). Strategi pembangunan prasarana dan sarana perkotaan kawasan andalan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 112–121.
- Indrajaya, Rusida, & Baharuddin, A. F. (2022). Strategi pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 136–146.
- Kim, S., & Ji, Y. (2018). Gap analysis. In *The international encyclopedia of strategic communication* (pp. 1–6). Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0079>
- McManus, P. (2023). Infrastructure, health and urban planning: Rethinking the past and exploring future possibilities. *Oxford Open Infrastructure and Health*, 1–7.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 2 (2026) 285-298 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i2.11123

- Mubarak, M. M., Subagiyo, A., & Dinanti, D. (2019). Persepsi masyarakat di kawasan perbatasan Pulau Sebatik terhadap persebaran dan kualitas sarana dan prasarana. *Planning for Urban Region and Environment*, 11-22.
- Noori, N., Hoppe, T., & de Jong, M. (2020). Classifying pathways for smart city development. *Sustainability*, 12(10), 1-24.
- Noori, N., de Jong, M., & Hoppe, T. (2020). Towards an integrated framework to measure smart city readiness. *Smart Cities*, 3(3), 676-704.
- Panwar, R., Hansen, E., & Kozak, R. (2014). Evaluating social and environmental issues by integrating legitimacy and expectation gaps. *Business & Society*, 53(6), 853-875. <https://doi.org/10.1177/0007650312438884>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Sutriadi, R. (2023). Soft infrastructure in smart sustainable cities. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 195-215.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034*.